

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh opini audit dan kinerja keuangan terhadap tingkat korupsi periode 2012-2015 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi per jumlah PNS. Opini audit tidak dapat menjadi patokan atau indikator ada atau tidak adanya tindak korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi.
2. Opini audit berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi per kapita. Opini audit dapat menjadi patokan atau indikator ada atau tidak adanya tindak korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi. Semakin baik opini audit atas LKPD semakin rendah tingkat korupsi.
3. Rasio kemandirian keuangan berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi per jumlah PNS dan tingkat korupsi per kapita. Apabila kemandirian keuangan daerah mengalami kenaikan maka menggambarkan bahwa kesejahteraan masyarakat membaik dan tingkat korupsi pun menurun.
4. Rasio aktivitas belanja tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi per jumlah PNS dan tingkat korupsi per kapita. Aktivitas belanja daerah (belanja rutin dan belanja modal) walaupun memiliki rasio yang tinggi atau rendah, tidak dapat menjadi patokan atau indikator ada atau tidak adanya tindak korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi.

5. Rasio pertumbuhan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi per jumlah PNS. Rasio pertumbuhan pendapatan bagus maka kesejahteraan masyarakat juga bagus yang juga menunjukkan semakin bagus kinerja pemerintah daerah dalam mendorong penerimaan PAD (pajak dan retribusi) dari tahun ke tahun sehingga kecilnya peluang terjadinya penyelewengan dan korupsi oleh pejabat daerah.
6. Rasio pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi per kapita. Walaupun kinerja keuangan yang di ukur dengan rasio pertumbuhan menunjukkan rasio tinggi ataupun rendah maka tidak dapat menjadi patokan atau indikator ada atau tidak adanya tindak korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi.
7. Opini audit, rasio kemandirian keuangan, rasio aktivitas belanja dan rasio pertumbuhan pendapatan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi per jumlah PNS dan tingkat korupsi per kapita. Penilaian terhadap aspek keuangan pada LKPD memang mempengaruhi tingkat korupsi pemerintahan provinsi di Indonesia. Semakin membaik penilaian yang diberikan BPK dan penggunaan dana APBD yang tepat, dapat mensejahterakan keadaan masyarakat sehingga korupsi akan berkurang pada pemerintah daerah provinsi di Indonesia.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk peneliti selanjutnya. Beberapa keterbatasan tersebut antara lain:

1. Penelitian ini menggunakan sampel pemerintahan daerah provinsi di Indonesia.
2. Variabel yang digunakan yaitu empat variabel bebas dan satu variabel terikat.
3. Periode penelitian yaitu dari tahun 2012-2015 dan pengambilan data korupsi melalui laporan tahunan Kejaksaan RI.

5.3 Saran

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan, maka berdasarkan keterbatasan tersebut, berikut saran yang diperlukan:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan memakai periode penelitian yang lebih lama dengan menambah tahun penelitian.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan juga dapat mengembangkan variabel independen yang digunakan. Pengembangan ini perlu dilakukan mengingat banyak variabel lain yang berperan dalam mempengaruhi tingkat korupsi, seperti tindak lanjut audit, rasio efisiensi dan efektivitas.
3. Untuk penelitian berikutnya, dapat melakukan penelitian tingkat korupsi dengan sampel pemerintahan pusat atau perusahaan BUMN, sehingga dapat menggambarkan tingkat korupsi yang terjadi di Indonesia.

4. Untuk penelitian berikutnya, dapat melakukan penelitian tingkat korupsi dengan mengukur tingkat korupsi melalui jumlah nilai Rupiah yang dikorupsi.

5.4 Implikasi Penelitian

1. Pemerintah Pusat, diharapkan lebih memperkuat pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah provinsi untuk mengurangi tingkat korupsi, karena jumlah kasus korupsi yang masih cukup tinggi dan fluktuatif.
2. Pemerintah Daerah, diharapkan mampu mempertahankan atau lebih meningkatkan target penerimaan PAD, dan lebih berfokus kepada pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, karena pada penelitian ini tingkat kemandirian keuangan daerah dan tingkat pertumbuhan pendapatan yang baik dapat mengurangi tingkat korupsi.

